

BAB II

LATAR BELAKANG KONFLIK DAN FAKTOR PENYEBAB KONFLIK SEPARATISME DI THAILAND SELATAN

Konflik di Thailand Selatan disebabkan karena masyarakat di wilayah tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan kaum mayoritas Thailand, termasuknya cara penyelesaian konflik oleh pemerintah pusat yang masih belum sesuai dengan keinginan masyarakat lokal. Adanya ketimpangan sosial, ekonomi dan politik hingga munculnya sebagian kelompok orang yang ingin memisahkan diri. Keinginan tersebut ditunjukkan dengan adanya gerakan-gerakan separatisme dan pemberontakan dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Bab ini terbagi menjadi lima bagian. Bagian pertama membahas mengenai latar belakang konflik, bagian kedua membahas mengenai faktor konflik, bagian ketiga membahas mengenai respon pemerintah pusat terhadap insiden besar pada tahun 2004, bagian keempat membahas mengenai kebijakan pemerintah terhadap Thailand Selatan, bagian kelima membahas mengenai respon internasional terhadap konflik di Thailand Selatan.

2.1 Latar Belakang Konflik Thailand Selatan

Thailand Selatan, khususnya provinsi Pattani, Yala, Narathiwat memiliki perbedaan besar secara sosial budaya. Jika wilayah-wilayah Thailand yang lain didominasi oleh etnis Thai yang beragama Buddha, maka wilayah Thailand Selatan didominasi oleh etnis Melayu yang beragama Islam.

Pada awalnya wilayah Thailand Selatan seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat merupakan salah satu bagian dari kerajaan Melayu Patani yang memiliki cakupan pusat perdagangan yang cukup luas dengan padatnya di sepanjang Laut Cina Selatan. Masyarakat Melayu Patani sendiri memiliki tiga hal yang menjadi kebanggaan terhadap kaumnya adalah (1) kebanggaan terhadap sejarahnya, (2) kebanggaan sebagai pusat kemakmuran pada salah satu dari Asia Tenggara (*one of the international enterpoly trade of Southeast Asia*) pada abad ke 17, (3) merupakan pusat pendidikan Islam di Asia Tenggara (*Center for Islamic Studies in Southeast Asia*) pada abad ke 19 [CITATION Jut05 \l 1054]. Namun, pada tahun 1902 bersamaan pada masa kemunduran kerajaan Melayu Patani mengadakan perjanjian Anglo-Siam antar pemerintah Siam dan Inggris yang menyatakan bahwa, wilayah Patani tidak akan menjadi kerajaan tersendiri lagi, karena akan menjadi bagian dari wilayah Thailand atau kerajaan Siam [CITATION Min05 \l 1054].

2.1.1 Kebijakan nasionalisme dan kebijakan asimilasi periode pasca perubahan pemerintahan

Pada saat dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Jenderal P. Phibhulsongkram tahun (1938-1944), mengadakan upaya *Thai-Nationalism* dan upaya asimilasi budaya yang memfokuskan kepada perubahan sosial dan budaya agar mengikuti kaum mayoritas Thai-Budhis di Thailand [CITATION Min05 \l 1054]. Kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menggantikan hukum Islam menjadi hukum perdata dan hukum komersial yang tidak memuat nilai-nilai keislaman. Adanya hukuman bagi masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu, dilarang

mempelajari kitab Al-Quran dan harus menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa resmi. Mempromosikan agama Buddha dan dilarang berhijab. Beberapa kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai Islam dan kebiasaan masyarakat Melayu sebelumnya.

Di samping menerapkan kebijakan pemerintah sentralistik, pihak Kerajaan Siam menerapkan identitas nasional dengan semboyan “*Thai Identity*” atau (*Eka lak thai*) yang mengakui hanya satu bangsa yaitu bangsa Thai, satu agama Buddha, dan tunduk para kekuasaan Raja [CITATION Min05 \l 1054]. Dari dimensi budaya, identitas tersebut dapat dilihat sebagai bentuk pemaksaan ideologi yang dapat mencabut masyarakat Muslim Patani dari tradisi dan identitas aslinya. Suku atau etnis Muslim Patani yang tidak menginginkan adanya pencampuran kultur Buddha dan Islam, menyebabkan munculnya keinginan untuk memisahkan diri.

Bagian dari kebijakan asimilasi budaya tersebut munculnya tokoh yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak masyarakat Melayu Patani yaitu Haji Sulong. Pada bulan April tahun 1947, Haji Sulong yang merupakan tokoh penting dalam gerakan separatisme Patani mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah Thailand yaitu: hak menuntut otonomi kepada semua wilayah Melayu Patani, mendesak pemerintah Thailand mengangkat seorang gubernur dari kalangan Melayu Patani untuk menjalankan pemerintahan bersama (*collective*) terhadap empat daerah, di wilayah Selatan yang memiliki mayoritas penduduk suku Melayu, meminta agar bahasa Melayu diakui sama statusnya dengan bahasa Thai dan digunakan sebagai bahasa pengantar bagi sekolah di wilayah Thailand Selatan, mendirikan Mahkamah Islam untuk menjalankan Undang-undang Syariah, menggunakan hasil sumber daya

alam dari daerah-daerahnya untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut [CITATION Chr96 \l 1054].

Haji Sulong merupakan pahlawan penting bagi masyarakat Melayu, tetapi dipandang sebagai pemimpin kelompok separatisme bagi pemerintah. Permintaan Haji Sulong menuntut hak otonomi daerah Melayu ini menyebabkan pihak pemerintah Thailand menangkap Haji Sulong dengan tuduhan penghasutan (*sedition*) dan dihilangkan tanpa jejak pada Januari 1948 [CITATION Chr96 \l 1054]. Pada tahun 1948 juga muncul ketegangan antara masyarakat dan pemerintah hingga menimbulkan aksi kekerasan dikenal sebagai “Pemberntak Dusongnyo”. Kasus Haji Sulong tersebut sama persis dengan kasus Mr. Phaisal Nilapaijit yang merupakan tokoh perjuangan masyarakat Melayu pada tahun 1997 yang dapat tuduhan oleh pemerintah dan dihilangkan jejaknya. Oleh karena itu, kebijakan integrasi pemerintah Thailand mendapat tantangan keras dari masyarakat dan menimbulkan perlawanan separatisme.

2.1.2 Berjalannya Konflik di Thailand Selatan

Bagian dari konsekuensi perlakuan pemerintah, menimbulkan kelompok separatisme. Gerakan pertama yang muncul adalah Gabungan Melayu Patani Raya (GEMPAR), sebuah organisasi politik yang didirikan pada tahun 1948, memiliki tujuan menyatukan kaum Melayu untuk menuntut kemerdekaan dari Thailand [CITATION Fit16 \l 1054].

Pada tahun 1959, Tengku Abdul Jalil pengikut Haji Sulong mendirikan gerakan perlawanan bawah tanah yaitu *National Liberation Front* (NLF). Kelompok

ini tidak hanya menuntut otonomi seperti sebelumnya tetapi lebih bergeser kepada mendirikan negara Islam. Seiring dengan jatuhnya harga karet dan timah yang menjadi sumber daya utama wilayah saati itu, masyarakat Patani mulai menyadari pemerintah mengeksploitasi sumber daya alam dan potensi ekonomi mereka tanpa membebrikan kontribusi yang adil kepada masyarakat [CITATION For04 \I 1054].

2.1.2.1 Konflik Fase I (1960-1998)

Setelah munculnya peraturan dari pemerintah Thailand yang mengharuskan pesantren-pesantren di Thailand Selatan mengadopsi kurikulum dan mengurangi bahasa lokal. Ustad Haji Abdul Karim Hasan menyatakan penolakannya dan kemudian membentuk kelompok bersenjata yang bernama Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada tahun 1960. Hal yang cukup menarik adalah perjuangannya, BRN tidak hanya mendukung ideologi Islam, tetapi juga ideologi nasionalisme Melayu dan sayap kiri (sosialisme)[CITATION Cha08 \I 1054].

Meskipun BRN cukup berhasil mengganggu stabilitas di Thailand Selatan melalui aksi-aksi bersenjata, kelompok tersebut tidak pernah berkembang menjadi ancaman regional yang serius karena kurangnya dukungan dari masyarakat Thailand Selatan sendiri, khususnya dari kalangan Muslim konservatif yang merasa tidak tertarik dengan ideologi sayap kiri yang didukung oleh BRN. Pada tahun 1968, sejumlah masyarakat Melayu yang merasa aksi-aksi perlawanan bersenjata terhadap pemerintah pusat terlalu minim lalu membentuk kelompok pemberontakan baru yang bernama *Patani United Liberation Organization* (PULO: Organisasi Pembebasan Bersatu Patani) [CITATION Cha08 \I 1054].

PULO dalam perkembangannya berhasil menarik perhatian masyarakat lokal Thailand Selatan karena selain melakukan perlawanan bersenjata, kelompok tersebut juga aktif dalam melakukan berbagai kegiatan sosial untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan kepada penduduk lokal. Akhirnya, PULO berhasil dan berkembang menjadi kelompok pemberontakan terbesar di Thailand. Namun, anggota PULO tidak pernah mencapai angka 400 orang, sehingga kelompok tersebut tetap kesulitan melakukan aksi-aksi penyerangan berskala besar. Selama melakukan aktivitas pemberontakan, PULO biasanya menargetkan sasaran-sasaran seperti sekolah, kantor pemerintah, kuil Buddha, dan elemen-elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Selain perbatasan personil, PULO dalam perkembangannya juga harus menghadapi masalah baru berupa konflik internal dalam tubuh keanggotaannya sendiri. Puncak dari konflik internal adalah ketika pada tahun 1993-1995, sebagian dari anggota PULO memutuskan untuk membentuk kelompok baru di mana kelompok tersebut dikenal sebagai *New PULO* (PULO Baru). Ketika dibandingkan dengan PULO, *New PULO* cenderung lebih agresif dan pragmatis karena mereka lebih fokus dalam kegiatan perjuangan bersenjata [CITATION Cha08 \l 1054]

Meskipun ada lebih dari satu kelompok pemberontak yang aktif dalam konflik, konflik di Thailand Selatan pada fase ini masih di skala yang kecil karena masing-masing kelompok hanya bekerja sendiri dan bersaing satu sama lain. Namun, pada tahun 1997, situasinya mulai berubah setelah kelompok-kelompok tersebut sepakat untuk membentuk kelompok pemberontak bersama dikenal sebagai “Bersatu” [CITATION Cha08 \l 1054].

Seiring dengan semakin meningkatkan intensitas konflik sejak terbentuknya “Bersatu”, pemerintah Thailand juga melakukan sedikit perubahan strategi untuk meredam konflik. Pemerintah meminta untuk bekerjasama dengan Mahathir Muhammad perdana menteri (PM) Malaysia saat itu, beliau setuju untuk melakukan kerjasama lintas batas wilayah dengan Thailand. Pemerintah Thailand mendapatkan hasil positif dari kerjasama tersebut karena tokoh-tokoh penting dari kelompok pemberontak Thailand Selatan yang selama ini bersembunyi di Malaysia berhasil diringkus oleh pemerintah Thailand. Sebagai akibatnya, kekuatan “Bersatu” sendiri mengalami penurunan dan Thailand Selatan sempat memasuki periode damai untuk sementara waktu pada masa tersebut.

2.1.2.2 Konflik Fase ke II (2001-2004)

Kembalinya masa damai di Thailand Selatan, pemerintah Thailand memberikan bantuan subsidi kepada Thailand Selatan untuk mengurangi konflik. Pemerintah Thailand berharap kepentingan-kepentingan dari masyarakat Thailand Selatan dapat terakomodasi, maka mereka tidak akan melakukan pemberontakan. Meskipun pada awalnya terlihat menjanjikan, namun kebijakan tersebut dalam praktiknya pemerintah tidak diikuti dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang mencukupi, penyerapan masyarakat Melayu ke dalam birokrasi, dan pengurangan pengangguran yang ada di Thailand Selatan. Puncaknya adalah ketika pada tahun 2001, pemerintah pusat Thailand membubarkan Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan (SBPAC) yang diidentifikasi oleh para ahli sebagai puncak *New roun violence* [CITATION Pis09 \l 1054].

Tidak mulusnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat Thailand dalam menangani masalah-masalah sosial di Thailand Selatan, lantas diikuti dengan pecahnya kembali aktivitas pemberontakan. Di akhir tahun 2001, lima aksi penyerangan terkoordinir yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang identitasnya tidak diketahui mengakibatkan lima anggota polisi dan satu relawan keamanan desa tewas. Tahun demi tahun berlalu, aksi-aksi penyerangan di Thailand Selatan terus mengalami peningkatan dari sekitar 75 kasus di tahun 2002 menjadi 119 kasus di tahun 2003 [CITATION Jos12 \l 1054].

Memasuki tahun 2004, intensitas konflik masih menunjukkan tren peningkatan. Para pelaku serangan juga mulai berani menargetkan target-target berpengamanan tinggi seperti pos tentara. Bulan Januari 2004 contohnya, sekitar 100 orang bersenjata menyerang pangkalan militer di Thailand Selatan dan merampas persenjataan yang tersimpan di dalamnya. Aksi serupa juga muncul di bulan Maret dan April 2004 dimana dalam aksi-aksi tersebut, para pelaku berhasil mengamankan aneka persenjataan moderen seperti senapan mesin, senapan serbu, peluncur granat berpendorong roket (RPG), dan bahan peledak.

Bulan April 2004 juga menjadi saksi dimana salah satu momen paling kontroversial dalam konflik di Thailand Selatan terjadi. Saat itu tepatnya pada tanggal 28 April, sekitar 100 orang anggota militant separatisme menyerang 10 pos militer di Thailand Selatan. Serangan tersebut berhasil dipatahkan dan sebagian dari para militan tersebut kemudian lari bersembunyi di Masjid Krue Sek, masjid yang sangat sakral oleh penduduk Muslim lokal. Para tentara yang mengejar militant tersebut lalu menembaki masjid dan menewaskan para militant yang bersembunyi di dalamnya.

Peristiwa tersebut langsung memancing kemarahan dari para penduduk Muslim, sehingga sejak saat itu, konflik di Thailand Selatan semakin diwarnai oleh sentimen agama [CITATION Jos12 \l 1054].

Momen kontroversial selama konflik di tahun 2004 belum sampai di situ. Bulan Oktober 2004 di kota Tak Bai, Narathiwat, para penduduk lokal berdemonstrasi menuntut dibebaskannya enam sukarelawan yang sebelumnya ditangkap oleh pejabat pemerintah karena dituduh menyediakan persenjataan untuk pasukan pemberontakan. Respon pejabat Thailand untuk meredam demonstrasi tersebut sangat kejam, bahkan terkesan berlebihan. Ratusan penduduk lokal ditangkap dan diikat sambil dipaksa menanggalkan pakaian bagian atasnya, lalu dimasukkan ke dalam truk dalam kondisi berhimpit-himpitan untuk kemudian diangkut ke pos militer di Patani.

Kontroversi muncul karena di dalam perjalanan, puluhan dari demonstran yang diangkut tersebut belakangan ditemukan meninggal akibat dehidrasi dan kekurangan oksigen dalam perjalanan. Tentara Thailand mendapat kecaman dari masyarakat, bukan hanya dari kalangan Muslim tapi juga dari golongan non-Muslim Thailand. Pada akhirnya ibarat sumbu yang memicu konflik fase baru di Thailand Selatan, yang berskala jauh lebih besar [CITATION Jos12 \l 1054].

2.1.2.3 Konflik Fase ke III (2005 - 2018)

Konflik di fase ini ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok pemberontak berideologi Islam yang baru terbentuk, misalnya Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP), dan Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP). Selain kelompok-kelompok baru tersebut, para “pemain lama” (*old group*) seperti PULO &

BRN mengalami kemunduran karena seiring dengan berkurangnya anggota dan perubahan paradigma. Sebagai gambaran singkat, jumlah anggota pemberontak pada fase ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan konflik pada fase-fase sebelumnya yang hanya melibatkan ratusan orang. Angka perkiraan menyebutkan bahwa jumlah orang yang terlibat dalam aksi-aksi penyerangan & vandalisme pada fase ini berkisar antara 5.000 orang.

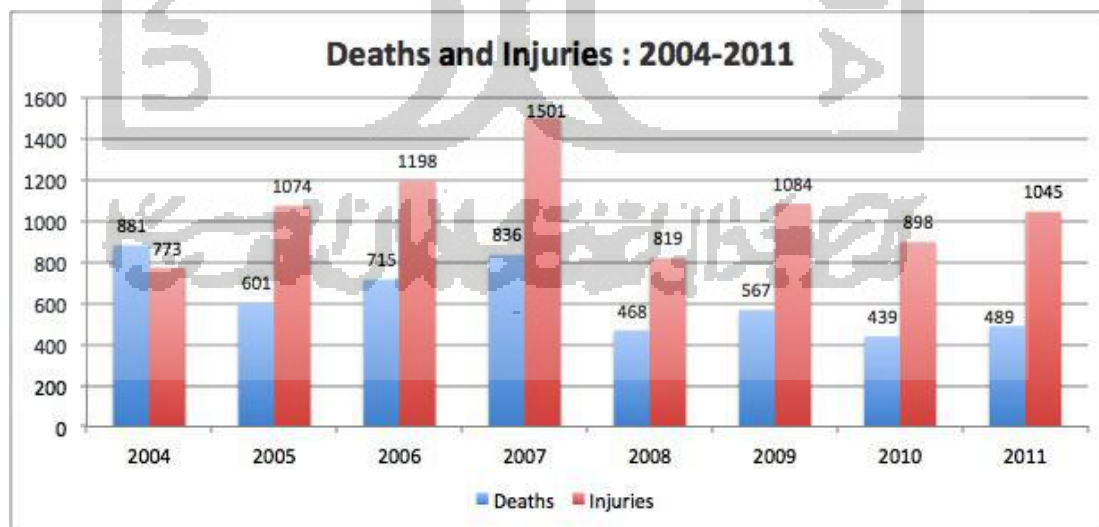
Di medan konflik sendiri, aksi-aksi vandalisme yang dilakukan oleh para pemberontak mengalami peningkatan pesat jika dibandingkan dengan konflik pada fase sebelumnya. Bulan Februari 2005 contohnya, sebuah bom rakitan seberat 50 kg meledak di perbatasan Thailand-Malaysia. Sebulan kemudian, beberapa buah bom meledak di bandara, supermarket, hotel provinsi Songkhla. Selain melakukan aktivitas pemboman, para milisi pemberontak juga semakin sering melakukan aksi-aksi penembakan dan pemotongan kepala kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, termasuk kepada para pemuka agama [CITATION Rep12 \l 1054].

Memasuki tahun 2006, terjadi kudeta militer yang mengakhiri rezim Thaksin. Pihak junta militer yang baru berkuasa awalnya berjanji akan lebih aktif menempuh taktik diplomasi dengan para pemberontak untuk mengakhiri konflik. Namun, di medan konflik sendiri aksi-aksi vandalisme dan penyerangan nyatanya masih belum mengalami penurunan. Salah satu contohnya adalah ketika di bulan Agustus 2006, para pemberontak meledakkan 22 bank di kota Yala. Belakangan, pihak militer Thailand mengakui bahwa masalah terbesar dalam taktik diplomasi adalah karena begitu banyaknya pihak pemberontak yang terlibat dalam konflik, mereka

kebingungan pihak mana yang sebaiknya diajak bernegosiasi [CITATION Rep12 \l 1054].

Tahun demi tahun berlalu selama periode itu, Thailand sempat beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan. Para pemimpin yang berkuasa tersebut juga sempat mengemukakan optimismenya bahwa konflik di Thailand selatan bakal segera berakhir. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa konflik belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera usai. Pada tanggal 9 Februari 2012 lalu contohnya, sebuah bom truk meledak di Thailand Selatan dan mengakibatkan sekurang-kurangnya satu orang meninggal. Sebulan sebelumnya, pasukan Thailand juga sempat terlibat baku tembak dengan pasukan pemberontak di mana pihak Thailand mengklaim, baku tembak tersebut menewaskan empat orang anggota pemberontak [CITATION Rep12 \l 1054].

Grafik1: Jumlah Kematian Berdasarkan Sumber Konflik di Thailand Selatan Tahun 2004-2011



Sumber : [CITATION Pun12 \l 1054]

Namun, jenis kekerasan berupa penembakan, peboman, penegakan hukum oleh pejabat pemerinah, pembakaran dan sebotase.

2.2 Faktor penyebab konflik di Thailand Selatan

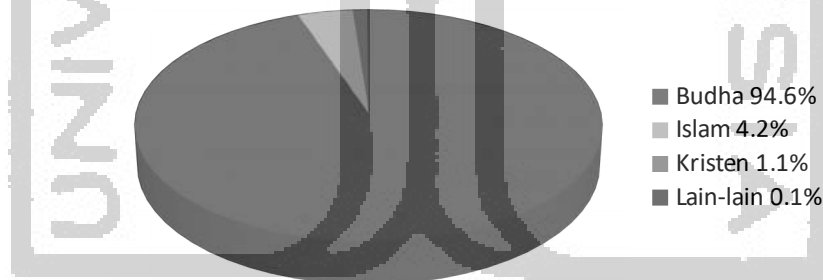
Fisher (2001) memberikan pengertian tentang konflik bahwa kemunculan konflik disebabkan oleh karena adanya identitas yang terancam, berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak dapat diselesaikan. Gerakan separatisme merupakan bentuk perlawanan budaya akibat adanya sikap diskriminasi [CITATION Fis01 \l 1054]. Wyatt (1967) menyatakan bahwa munculnya gerakan separatisme Patani dilatarbelakangi beberapa hal: pertama, sejarah penaklukan oleh Kerajaan Siam. Patani dahulu merupakan kerajaan yang kuat dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan di Asia. Namun, dengan adanya penaklukan oleh Thailand diikuti dengan banyaknya kebijakan dan tata pemerintahan baru yang sangat berbeda dengan sebelumnya, ditambah adanya benturan kepentingan, maka muncullah gerakan separatisme [CITATION Dav67 \l 1054]. Kedua, kepentingan ekonomi, wilayah Thailand Selatan memiliki sumber daya alam yang cukup subur, terutama minyak bumi dianggap tidak dapat menikmati hasil sebagaimana orang pribumi. Akses ekonomi hanya dinikmati komunitas lain. Ketiga, migrasi internal, adanya program migrasi internal dengan kebijakan pemindahan

paksa seluruh penduduk Melayu Muslim ke Selatan mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi dan juga kesenjangan politik antara komunitas Muslim Melayu Thailand dengan komunitas non-Muslim [CITATION Min05 \l 1054].

Adapun faktor-faktor penyebab konflik di Thailand Selatan dapat dibedakan menjadi faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi sebagai berikut :

Jumlah pemeluk agama Buddha merupakan agama mayoritas dibandingkan agama Islam dan agama lain di Thailand. Jumlah pemeluk agama Budha dari survei Kantor Statistik Nasional (2015) memiliki di sekitar 94.6 persen di banding pemeluk agama Islam yang memiliki hanya jumlah 4.2 persen pada seluruh Thailand.

Grafik 2. Diagram Pemeluk Agama Mayoritas dan Minoritas di Thailand



Sumber : [CITATION NSO15 \l 1033]

Berikutnya, adalah tabel jumlah pemeluk muslim di berbagai wilayah di Thailand yang menunjukkan bahwa Thailand Selatan memiliki jumlah Muslim yang

beretnis Melayu lebih banyak yaitu sekitar 80.9 % dibanding wilayah lain di Thailand yang hanya 19.1 % penduduk Muslim, sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah dan Persentase Muslim di Berbagai Wilayah di Thailand

Wilayah	Jumlah	Persentase
Bangkok	262.023	9.4
Wilayah Tengah	220,414	7.9
Wilayah Utara	30,637	1.1
Wilayah Timur	18,069	0.7
Wilayah Selatan	2,246,399	80.9
Total	2,777,542	100.0

Sumber : [CITATION NSO02 \I 1033]

Secara geografis Thailand Selatan (Patani) diklaim sebagai wilayah kerajaan Thai tetapi secara demografis dan kultural Patani selalu dilihat sebagai bangsa lain yang kehadirannya dianggap mengganggu keutuhan bangsa itu, akibatnya mereka didiskriminasi karena berbeda ras berbeda etnis, dengan demikian juga beda kultur. Perbedaan itu, yang membuat pemerintah Thai bersikap diskriminatif bahkan cenderung diekpresikan dengan tindak kekerasan baik yang terbatas maupun massa.

Gambar 4 : Etnis Melayu di Thailand Selatan



Sumber : [CITATION Rep12 \l 1033]

Selain agama, etnis, bahasa, dan budaya yang merupakan sumber masalah, di tiga provinsi Selatan juga memiliki masalah kemiskinan, pengangguran, dan tingkat pendidikan dan GDP yang masih rendah. Kekurangan memberi perhatian dari pemerintah pusat kepada wilayah tiga provinsi Selatan merupakan titik perasaan diskriminasi bagi masyarakat wilayah Patani, Yala, dan Narathiwat. Adanya asimilasi dan dominasi dari pemerintah pusat, semakin mempersulit penduduk Thailand Selatan dalam proses pembangunan dan kesejahteraan.

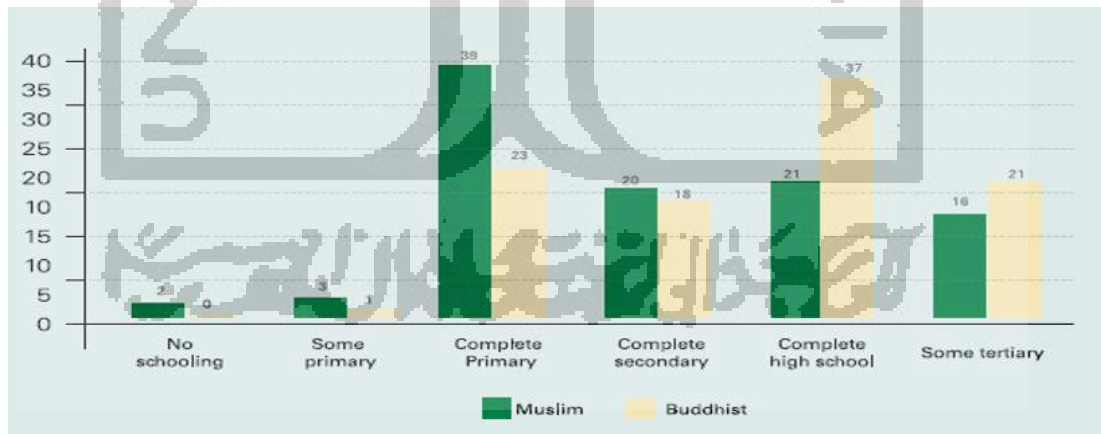
Tabel 5 : Pendapatan Perkapita Rata-Rata Penduduk di Thailand Selatan

Southern Region Province	GDP per capita :	Population: (thousands)
1. Chumphon	143,544	9,210
2. Ranong	168,460	488
3. Surat Thani	100,720	255
4. Phang Nga	191,927	1,047
5. Krabi	237,971	269
6. Nakhon Si Thammarat	234,436	373
7. Trang	98,627	1,526
8. Phuket	107,720	625
9. Phatthalung	357,498	536
10. Satun	69,159	508
11. Songkhla	124,400	281
12. Pattani	157,029	1,539
13. Yala	86,571	627
14. Narathiwat	98,562	446
	61,115	689

Sumber : [CITATION Tha161 \ 1033].

Berdasar tabel tersebut wilayah tiga provinsi Selatan berada di nomor 12,13,14 memiliki jumlah GDP yang masih rendah dibanding wilayah Selatan lainnya yang tidak berkonflik. Berdasarkan yang dilaporkan oleh *National Economic and Development Boards* (NESDB) Thailand, pendapatan perkapita rata-rata dari tiga provinsi Selatan yaitu Pattani Yala dan Narathiwat termasuk yang terendah di seluruh Thailand, kurang dari 73 ribu Bath pertahun di provinsi Pattani, dan 55 ribu Baht pertahun di provinsi Yala. Selain itu NESDB juga melaporkan bahwa Narathiwat merupakan provinsi termiskin di Thailand Selatan dengan 46% dari populasi berada di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 193 ribu orang memperoleh pendapatan bulanan 808 Bath di bawah rata-rata penduduk Thailand lainnya [CITATION Pun15 \ 1033].

Grafik 6 : Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk di Thailand Selatan



Sumber : [CITATION Pra10 \ 1033]

Selain masalah kemiskinan termasuk juga masalah tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah. Terdapat hasil dari proyek survei kualitas hidup masyarakat di tiga provinsi Selatan (PSKM) pada tahun 2009, ditemukan bahwa mayoritas populasi usia sekolah di tiga provinsi Selatan rata-rata hanya menyelesaikan sekolah dasar, pendidikan lebih lanjut dalam pendidikan tinggi secara bertahap memiliki jumlah yang menurun, baik di tingkat menengah maupun tersier, terutama populasi Muslim [CITATION Pra10 \l 1033].

Berdasar laporan tersebut, menunjukkan bahwa masalah pendidikan di wilayah tiga provinsi Selatan masih ada. Meskipun telah banyak lembaga pendidikan agama terbuka di seluruh wilayah, maupun beberapa tempat dapat dianggap sebagai lembaga pendidikan berkualitas bagi masyarakat Thailand Selatan. Seperti yang di laporkan oleh Decha Hanhaboon (2010), mengatakan bahwa sekolah swasta yang mengajarkan agama Islam bersama-sama dengan mata pelajaran umum, memiliki banyak sekolah terkenal seperti Thamwittaya school, sekolah Phatthana Wittaya dan Darussalam Atthagiyah, siswa yang lulus dari sekolah ini dapat belajar di semua cabang universitas di negara termasuk banyak universitas asing [CITATION Dec10 \l 1033].

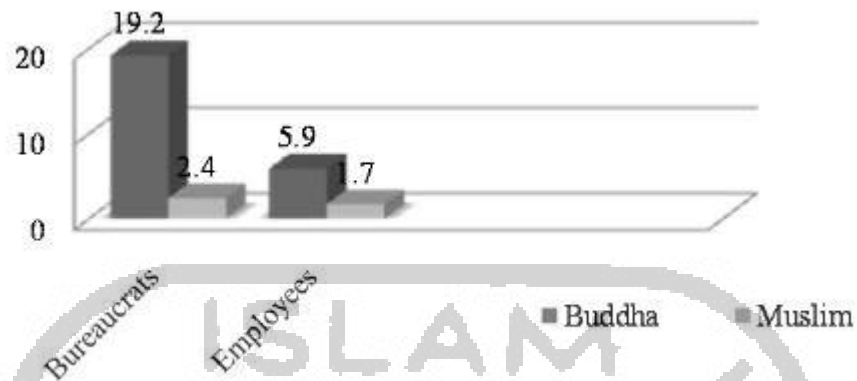
Ketika mempertimbangkan sistem pendidikan wilayah Selatan dengan wilayah lain, wilayah Selatan masih kurang bersekolah dari yang seharusnya, terutama di pendidikan menengah (SMP, SMA) dan pendidikan tinggi seperti universitas jumlah peserta cenderung menurun. Konsekuensi dari rendahnya pendidikan ini juga pasti akan berdampak pada pengangguran dan juga

ketidakmerataan ekonomi. Oleh karena itu wilayah Selatan masih butuh perhatian dari pemerintah pusat.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Thailand Selatan dilatarbelakangi oleh adanya penghapusan pendidikan tradisional melayu oleh pemerintah Thailand yang mengembangkan kebijakan asimilasi dan memasukkan pendidikan semisekuler di lingkungan pondok dan kewajiban penggunaan bahasa Thai dalam proses pembelajaran. Sistem pendidikan seperti ini tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Thailand Selatan, sehingga terjadi pengurangan semangat untuk memperoleh pendidikan tinggi [CITATION Dec10 \l 1033].

Pada sektor pekerjaan penempatan penduduk Buddha dan Muslim atas sektor publik, yakni penduduk Buddha yang mengisi jabatan birokrat jauh lebih besar dari penduduk Muslim. Padahal sebagian besar penduduk di wilayah Selatan merupakan mayoritas Muslim. Penduduk Buddha yang mengisi jabatan sebagai birokrat jauh lebih besar yaitu sekitar 19.2 persen, sedangkan jumlah Muslim yang mengisi jabatan sebagai birokrat di sekitar 2.4 persen. Begitupun dalam bidang-bidang pekerjaan yang lain, yakni sebagai berikut:

Grafik 7: Penempatan Budha dan Muslim Pada Sektor Publik di Thailand Selatan



Sumber : [CITATION Sri06 \l 1033]

Ketidaksamaan tersebut memicu kepada pembunuhan masyarakat Buddha di wilayah Selatan oleh kelompok separatisme untuk menambah peluang bagi masyarakat Melayu dalam pekerjaan birokrat.

Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab konflik selain sejarah zaman dulu, termasuk juga faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi. Secara sosial, terancamnya budaya etnik Muslim-Melayu karena dibentuknya sistem administrasi terpusat, diterapkannya asimilasi serta sekularisasi sekuler. Secara politik, disebabkan karena adanya beberapa kebijakan pemerintah yang mengancam masyarakat. Secara ekonomi, adanya kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran antara wilayah di Thailand Selatan dan wilayah Thailand lainnya.

2.3 Respon Pemerintah Pusat terhadap Insiden-Insiden tahun 2004

Pada tahun 2004 yang merupakan tahun sumber kekerasan di Thailand Selatan. Pemerintah Thaksin Shinawatra (PM) pada masa tersebut membentuk “Komisi Independen untuk Menyelidiki Fakta tentang insiden Masjid Kreu Sek” (คณะ

กรรมการอิสระได้สวนข้อเท็จจริงกรณีมีสียึดกรือเซะ). Suara mayoritas dari dewannya menyatakan bahwa pejabat pemerintah perlu menggunakan senjata untuk melindungi dirinya dan masyarakat yang tidak bersalah. Untuk mengakhiri insiden masjid Kru Sek, lebih tepat menggunakan alat-alat kekerasan dan senjata berat untuk mengakhiri insiden. Namun, insiden tersebut berlaku dibawah perintah Jenderal Punnarin Manee, Wakil Direktur Divisi Keamanan Internal (ISOC) dan Kolonel Manas Kongka, komandan Pasukan Khusus Provinsi Pattani [CITATION Jan16 \l 1054].

Pada tanggal 28 November 2006, dua tahun setelah insiden Kru Sek pengadilan provinsi Pattani mengajukan 32 investigasi kriminal Masjid Kru Sek. Tetapi perintah pengadilan ditutup. Namun, proses untuk menuntut keadilan untuk korban memiliki proses yang sangat sulit bagi masyarakat dalam melakukan petisi kematian tersebut dan mayoritas menyerah dengan tidak menuntut [CITATION Jan16 \l 1054].

Pada 10 Februari 2009 kantor kejaksaan agung oleh Mr. Valee Lertrakul, wakil jaksa agung bertindak sebagai jaksa agung mengirimkan surat petisi ke Mrs. Angkana Neelapaijit, sebagai kelompok kerja untuk keadilan dan perdamaian (KKP). Surat tersebut diperintah kepada kelompok KKP yang selama ini mendukung masyarakat untuk mengajukan tuntutan kasus kematian di Masjid Kru Sek bahwa, kantor jaksa agung menyatakan kasus kematian di Kru Sek dianggap tidak ada perintah untuk menuntut.

Sidang untuk mengadili para tentara yang dituding bertanggung jawab atas insiden tersebut sempat dilangsungkan, namun para terdakwa ternyata hanya

menerima vonis hukuman ringan. Kemudian, masih banyaknya misteri yang menyelimuti insiden tersebut, insiden-insiden kontroversial yang melibatkan tentara Thailand tersebut [CITATION Jos12 \l 1054]. Namun, kasus insiden Tak Bai pun mengalami sama statusnya dengan kasus masjid Krue Sek.

Selain kasus Masjid Krue Sek, muncul kekerasan besar di distrik Saba Yoi, Provinsi Songkhla. Ada sekitar 20 pemuda, mengendarai sepeda motor ke unit layanan umum yang dilengkapi dengan pisau, ada dua orang yang kelihatannya ingin menyerang pejabat pemerintah maka mereka ditembak oleh pejabat pemerintah hingga akhirnya pemuda 19 orang tersebut meninggal.

Pada tanggal 19 September 2008, mengadakan otopsi oleh dokter bahwa 19 orang yang meninggal dikarenakan ditembak mati oleh polisi dengan mengklaim bahwa pelaksanaan tugas. Investigasi kematian oleh pejabat pemerintah terhadap kejadian pada 28 April 2004 tersebut menjadi kritikan tentang keadilan oleh masyarakat bahwa masyarakat merasa tidak adil dalam pemeriksaan dari pemerintah

Pornpan Khongkasai sebagai anggota *Mixed Culture Foundation* (MCF), memberi pendapat tentang korban dari insiden Masjid Krue Sek dan 19 orang korban di distrik Saba Yoi memiliki bukti yang jelas bahwa kematian tersebut dikarenakan pejabat pemerintah melakukan tindakan yang berlebihan hingga munculnya kematian. Akan tetapi, proses melanjutkan penyelidikan kematian tidak dilanjutkan oleh pemerintah.

Pendapat Pattama Pimmiya sebagai ketua desa distrik Saba Yoi, ia merupakan salah satu pembantu tentang proses kematian pada insiden tersebut menyatakan bahwa, sebenarnya masyarakat lokal masih memiliki trauma dengan ketidakadilan

pemerintah, tidak ada yang memperhatikan kesedihan masyarakat. Sama statusnya dengan insiden Masjid Krue Sek, masyarakat masih ingat tentang kekerasan tersebut, masyarakat masih mempersoalkan mengenai kekerasan yang berlebihan. Namun beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti mempromosikan tempat wisata dan membangun industry bukan kebijakan utama yang diinginkan masyarakat. Masyarakat ingin mengadakan investigasi, tetapi tidak ada kesempatan untuk menuntut, kata Pattama pada tahun 2011 [CITATION Jan16 \l 1054].

2.4 Kebijakan Pemerintah terhadap Konflik di Thailand Selatan

Berikut ini, adalah dua kebijakan penyelesaian konflik yang berdampak negatif dari pada dampak positif. Pertama, Perdana Menteri Thaksin Shinawatra saat itu, memobilisasi lebih banyak personel militer di area konflik dan hampir 70.000 anggota tentara pro-pemerintah yang diterjunkan sejak tahun 2004. Namun, minimnya ketrampilan pasukan tentara dalam metode-metode anti-teror dan buruknya rasa saling pengertian dengan penduduk lokal menyebabkan upaya para tentara untuk meredam konflik menjadi tidak efektif.

Kedua, pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum khusus, hukum khusus tersebut merupakan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat pemerintah “khusus” dalam pencarian, penangkapan, penahanan, penyelidikan dan pemeriksaan masyarakat untuk mengendalikan konflik. Hukum khusus tersebut menurut organisasi *Human Right Watch* (HRW) merupakan hukum yang melanggar hak asasi manusia, contohnya ketika pejabat pemerintah menuduh seseorang melakukan pelanggaran hukum, pejabat dapat mengendalikan orang tersebut selama tujuh hari dan melarang

untuk dikunjungi selama tiga hari, hal tersebut bertentangan dengan proses hukum pidana negara.

Adanya hukum khusus ini, pejabat pemerintah sering menangkap masyarakat tanpa kesalahan yang terbukti, ketika tidak ditemukan kesalahan, pejabat hanya membebaskan masyarakat tanpa pemberian kompensasi atau permohonan maaf sebagai bentuk kelalaian dalam bertugas. Hal tersebut menimbulkan perasaan diskriminasi bagi masyarakat di tiga provinsi Selatan. Akibat dari diskriminasi tersebut menimbulkan perspektif identitas yang berbeda “*Aku Melayu, Kamu Siam*” menjadi alasan untuk membentuk kelompok separatisme di daerah Selatan. Meskipun, pemerintah sudah berupaya memberikan bantuan subsidi untuk memperbaiki tempat wisata dan membangun industri untuk memanfaatkan sumber daya serta meningkatkan ekonomi di Thailand Selatan, namun konflik masih dapat di rasakan hingga saat ini.

Dari problem rasial seperti yang telah disebutkan di atas, timbullah pengelompokan kaum muslim di Thailand menjadi dua golongan, sebagai berikut :

2.4.1. *Assimilated group* atau golongan yang terasimilasi atau bergabung dengan kaum mayoritas yaitu bergabung dengan masyarakat Thai-Budha pada segala bidang tatanan kehidupan yakni tidak sampai pada masalah keagamaan dan masalah lainnya. Biasanya kelompok ini tidak pernah mengalami kekerasan secara langsung.

2.4.2. *Unassimilated group* atau golongan yang tidak berbaur dengan kaum mayoritas, hingga ingin memisah diri. Golongan tersebut lebih menunjukkan kultur Melayu Islam pada bahasa dan adat. Golongan ini bertempat tinggal di daerah Yala, Narathiwat dan Pattani.

2.5 Respon Pihak Internasional Terhadap Konflik di Thailand Selatan

Puncak kekerasan di Thailand Selatan pada tahun 2004, ditandai dengan tiga peristiwa penting, yakni serangan Pada tanggal 4 Januari 2004, terjadinya perampokan senjata atau insiden (*Plon Peun*), serangan terhadap Masjid Kreu Sek pada tanggal 28 April 2004 dan insiden kekerasan di Tak Bai pada tanggal 25 Oktober 2004, telah memakan ratusan korban jiwa, sedangkan sekitar 1.300 orang Muslim ditangkap dan dibawa ke kamp militer. Kejadian ini menimbulkan kontroversi besar. Spekulasi mulai bermunculan di antaranya tuduhan kekerasan yang berlebihan, metode yang terlalu keras, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Hal tersebut menarik perhatian Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Sebagai salah satu organisasi internasional yang berfokus pada hak asasi manusia kelompok minoritas, OKI terlibat dalam konflik yang terjadi antara pemerintah Thailand dengan kelompok separatisme Thailand Selatan. Atas mandat yang di terima oleh OKI berdasarkan Piagamnya, OKI melindungi hak-hak muslim minoritas dan masyarakat non-anggota, dan untuk menjalankan mandatnya ini, OKI memiliki misi untuk menjaga kelompok minoritas dan komunitas muslim di negara non-anggota dan melakukan intervensi atas nama perlindungan hak asasi manusia yang berkonsentrasi pada agama yang mengikat muslim secara bersama.

Professor. Ekhmelden Ihsanoglu Sekretaris Jenderal OKI saat itu mengecam kejadian yang menewaskan masyarakat Thailand Selatan. OKI menyerukan negosiasi

dan dialog damai untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim Patani di Thailand Selatan. OKI juga menyerukan kepada pemerintah Thailand agar memperlakukan masyarakat Muslim di Thailand Selatan sejajar dengan warga negara yang lainnya [CITATION lmt09 \l 1033].

Pada tahun 2005, OKI berkunjung ke Thailand Selatan untuk meninjau kondisi konfliknya. Sesuai dengan kerangka kerja yang dimiliki oleh OKI untuk melakukan resolusi konflik, para delegasi OKI memulainya dengan pengumpulan fakta-fakta. Dari data yang mereka temukan, para delegasi menyimpulkan bahwa kerusuhan di Thailand berakar pada pengabaian budaya wilayah Selatan oleh pemerintah. Hal ini yang sebenarnya memicu konflik hingga terjadi sampai saat ini [CITATION OKI06 \l 1033].

OKI dengan pemerintah Thailand guna mencari solusi untuk Thailand Selatan. Pada tahun 2009, OKI juga berupaya mengikutsertakan kelompok pemberontak ke dalam proses perdamaian. Pertemuan OKI dengan kelompok separatis dimulai dari PULO. Presiden PULO, Al Haj Abu Yasir Fikri diundang ke Kesekretariatan OKI di Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 18-19 April 2009 . Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PULO menyebutkan bahwa untuk memahami permasalahan yang sebenarnya di Thailand Selatan, semua pihak harus melihat akar permasalahan yang lebih mendalam. Thailand melihat wilayah Selatan sebagai bagian wilayahnya, namun gerakan-gerakan pembebasan melihat Thailand sebagai kekuatan kolonial yang menduduki tanah mereka dengan paksa, tidak mengakui keberadaan

identitas etnis Melayu, sehingga menimbulkan hambatan yang besar untuk berdampingan hidup secara damai [CITATION MFA09 \l 1033].

Setelah mendengarkan pandangan dan komentar dari perwakilan PULO, OKI mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 23-25 Mei 2009 di Damaskus, Suriah. Inti dari rekomendasi tersebut adalah OKI menyayangkan belum adanya kemajuan dari komitmen pemerintah Thailand untuk mengatasi konflik sejak diangkatnya isu Thailand Selatan di konferensi OKI tahun 2006. Sekretaris Jendral OKI juga mengundang negara-negara anggota yang memiliki hubungan kuat dengan Thailand untuk membantu negara tersebut mengimplementasikan secara penuh kesepakatan yang telah terbentuk yang akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan perdamaian di Thailand Selatan, dalam hal ini adalah Malaysia yang kedepannya akan menjadi mediator dan fasilitator dalam negosiasi antara pemerintah Thailand dan perwakilan kelompok separatisme [CITATION MFA09 \l 1033].